

**ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN PADA DINAS TATA KOTA
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH

NAMA : MUHAMMAD DADI

NIM : 22 2003 086

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**



**ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN PADA DINAS TATA KOTA
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

NAMA : MUHAMMAD DADI

NIM : 22 20030 86

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**



Halaman Pernyataan Bebas Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dadi

Nim : 22 2003 086

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Febuari 2008



Muhammad Dadi



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

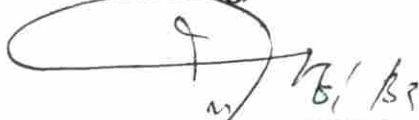
JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN SRATEGI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENERIMAAN RESTRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN PADA DINAS TATA KOTA
PALEMBANG

Nama : MUHAMMAD DADI
NIM : 22 2003 086
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Sistem Pengendalian Management ✓

Diterima dan Disyahkan

Pada tanggal,

Pembimbing,



(M. Orba Kurnawan, S.E, S.H)

Mengatahui

Dekan

Ueb Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, SE. M.Si)

Motto :

❧ *Kesabaran, ketabahan, kejujuran, keteguhan hati dan semangat serta ingat kepada Allah adalah modal untuk meraih keberhasilan.*

(Penulis)

❧ *Jadikanlah Sholat dan Zikir Kepada Allah menjadi penolongmu.*

(Al-Quran)

Wujud Syukur Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

❧ *Ayahanda dan Bunda tercinta.*

❧ *Adik-adikku tersayang.*

❧ *Seseorang yang kucintai karena Allah.*

❧ *Amamater.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Ahamdulillahirobil A'lamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Strategi Manajemen Dinas Tata Kota Kota Palembang Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang**”.

Dinas Tata Kota Kota Palembang merupakan salah satu dinas pembantu dalam hal pemungutan retribusi, Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah unsur pelaksana pemerintah kota Palembang dibidang tata kota dan keindahan kota sesuai dengan wewenang pemerintah dengan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu retribusi yang dikelola oleh Dinas Tata Kota, dalam hal ini penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang berjudul Strategi Manajemen Dinas Tata Kota Kota Palembang Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan kedua adikku atas bimbingan, doa, kebersamaan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan Busroh, SE., SH, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada

pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H.M.Idris, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H.M.Rosadi, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Nina Sabrina, SE selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Ir. H.Ucok Hidayat selaku Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
7. Bapak Coryaman, ST dan Tante Ida yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini
8. Keluarga Bapak H.M.Asyik Abdullah yang telah memberikan dukungan semangat dan doa.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan : Rolis, Novrian, Qodar, Enap, Mail, Fredi.
10. Keluargaku : Adikku Yusman Azhari Somad dan Abdurrahman.
11. Kekasihku tersayang Dwi Sari Noviyanti yang telah memberikan dukungan semangat dan doa.
12. Teman-teman di Jurusan Akuntansi UMP angkatan 2003, Nisa, Elle, Dila, Beti, Ari, dan tim bola kaki AK-2003.

13. Teman-teman KKN diDesa Gunung Megang Dalam Kabupaten Muara Enim, terima kasih atas kebersamaannya selama kegiatan KKN berlangsung.

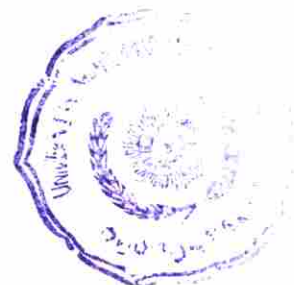
Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan, namun penulis menyadari bahwa baik itu materi maupun cara pembahasan masih banyak terdapat kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi meningkatkan kualitas skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua amal baik yang telah diberikan, terakhir penulis berharap tulisan sederhana ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKARTA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Strategi.....	9
2. Definisi Manajemen Strategi.....	11
3. Manfaat Manajemen Strategi.....	11
4. Tahap-tahap Manajemen Strategi.....	13

5. Tahapan Manajemen Strategi.....	13
6. Tahap-tahap Proses Perumusan Strategi.....	15
7. Retribusi.....	15
a. Pengertian Retribusi.....	15
b. Perhitungan dan Pelaksanaan pemungutan retribusi.....	17
c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	18
1) Pengertian Izin Mendirikan Bangunan.....	19
2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	19
3) Dasar Pengenaan Retribusi Perizinan Bangunan.....	20
4) Tarif Retribusi Perizinan Bangunan.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	23
B. Tempat Penelitian.....	25
C. Operasional Variabel	25
D. Data Yang Diperlukan.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	28

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Singkat Dinas Tata Kota Kota Palembang.....	29.
2. Struktur Organisasi.....	32

3. Uraian Tugas Dinas Tata Kota Kota Palembang.....	34
4. Laporan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	48
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	
1. Strategi Manajemen Dinas Tata Kota.....	52
2. Kendala-kendala yang dihadapi.....	63

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Selesai Riset dari Tempat Penelitian**
- Lampiran 2 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian**
- Lampiran 3 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Membaca Al-Qur'an**
- Lampiran 5 Biodata Penulis**

ABSTRAK

MUHAMMAD DADI/222003086/2008/ Strategi Manajemen Dinas Tata Kota Kota Palembang Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi manajemen dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada dinas tata kota kota palembang dan kendala apakah yang dihadapi oleh dinas tata kota kota palembang dalam melaksanakan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tindakan yaitu untuk strategi manajemen retribusi izin mendirikan bangunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif berbentuk penjelasan-penjelasan mengenai strategi yang dilakukan, sedangkan teknik analisis yaitu dengan menguraikan tahap-tahap strategi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang

Hasil Penelitian menunjukkan Strategi Manajemen yang digunakan adalah Perumusan Strategi, Pelaksanaan Strategi, Evaluasi Strategi yang terdiri dari Rencana Strategi Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

Kata Kunci : Stategi Manajemen dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan wewenang daerah untuk mengukur dan mengurus pemerintah daerah, salah satu yang mendasari perlu diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam negeri maupun diluar negeri. Dilain pihak, keadaan diluar negeri menunjukkan semakin tingginya tingkat globalisasi yang menurut daya saing antar negara, termasuk daya saing antar pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah diharapkan akan dapat menunjang tingkat kemandirian daerahnya untuk dapat membiayai semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperolehnya dari hasil pendapatan daerah masing-masing.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani, terciptanya pemerintahan yang baik dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan akibat dari reformasi, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang sangat penting artinya dalam sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemerintahan pusat dan daerah. Kedua undang-undang itu adalah undang-undang No.34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No.32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa dampak yang sangat mendasar pada kehidupan tata pemerintahan dan tata keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ada pada akhirnya

nanti akan membawa perubahan dasar pula pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat dan sebagaimana nantinya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber daya yang potensial dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai belanja daerah.

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntuk keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak untuk merealisasikannya. Disamping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi adalah berorientasi kemasa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan.

Salah satu yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah dengan cara memanfaatkan dan mengelola potensi yang terdapat didaerah masing-masing antara lain potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya keuangan secara optimal. Namun untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada disuatu daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidaklah mudah,

pengusaha yang mendirikan bangunan harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dalam batas waktu pembayaran selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pejabat dan apabila belum juga membayar Retribusi maka akan mendapatkan surat teguran.

Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat terwujud. Pengelolaan retribusi harus dilaksanakan dengan baik dari segi administrasi maupun tata cara pemungutannya. Setiap jenis-jenis retribusi mempunyai tata cara yang berbeda ini diatur menurut peraturan daerah yang bersangkutan biaya pemungutan retribusi daerah harus dapat dilihat dari prinsip dan sasaran yang dituju, sehingga dapat dilakukan penetapan tarif sesuai terhadap jenis-jenis retribusi tersebut.

Menurut Fred R. David, (2004:9), Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, dan *joint venture*.

Dinas Tata Kota merupakan salah satu Dinas pembantu dalam pengelolaan retribusi daerah. Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksanaan Pemerintah kota dibidang tata kota sesuai dengan Kewenangan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Tata Kota (DTK) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah tanggung jawab Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang diatur melalui undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menurut kedua Undang-Undang tersebut pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan mendirikan bangunan, objek pajaknya meliputi gedung perkantoran, Hotel, tempat usaha Perumahan, Rumah pribadi dan lain-lain. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan mendirikan bangunan.

Dinas Tata Kota (DTK) mempunyai tugas pokok membantu Walikota Kota Palembang dalam melaksanakan Kewewenangan Kota Palembang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Izin Mendirikan Bangunan, keindahan dan tata kota kota palembang

Tugas Dinas Tata Kota Kota Palembang yaitu mengelola retribusi, retribusi yang dikelolanya antara lain adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Retribusi Cetak Peta Situasi
3. Retribusi Pembinaan dan Penyelenggaraan Reklame
4. Retribusi Izin Penggunaan Tanah (IPT)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang dalam pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah masih rendahnya realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut dibandingkan anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang padahal potensi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut cukup besar, kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang

Tahun	Anggaran	Realisasi
2005	Rp 19.000.000.000,-	Rp 17.281.187.400,-
2006	Rp 22.500.000.000,-	Rp 12.523.390.750,-

Sumber : Dinas Tata Kota Kota Palembang Tahun 2005-2006

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Anggaran Penerimaan Retribusi Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang belum tercapai. Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2005 sebesar Rp 19.000.000.000,- dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 17.281.187.400,- pada tahun 2006 sebesar Rp 22.500.000.000,- dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 12.523.390.750,-

Berdasarkan tabel diatas penerimaan Dinas Tata Kota Kota Palembang pada tahun 2005 dan 2006 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang.

Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Strategi Manajemen Dinas Tata Kota Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi manajemen dalam rangka meningkatkan penerimaan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota dalam melaksanakan pemungutan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi manajemen dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai Sistem Pengendalian Manajemen.

b. Bagi Tempat Penelitian

Memberi masukan bagi Dinas Tata Kota Kota Palembang tentang strategi manajemen di masa yang akan datang.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Pengendalian Biaya Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Yuli Denianti (2006) Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana pelaksanaan Pengendalian biaya pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang dan Upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang untuk menekan biaya pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan Adapun tujuannya adalah Untuk mengetahui pengendalian biaya pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang dan Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang untuk menekan biaya pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Data yang digunakan adalah data primer, dan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara dan dokumentasi.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Perencanaan sebaik apapun akan gagal apabila pihak manajemen tidak melakukan tindakan manajemen strategis. Agar dapat melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang sesuai dengan rencana, maka pihak manajemen harus melakukan kegiatan-kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi harus dilakukan secara terus menerus. Tidak hanya dilakukan pada akhir tahun atau semester. Proses manajemen strategis tidak pernah berhenti.

Proses manajemen strategis merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan perubahan dalam komponen manajemen strategis yang komprehensif dapat menyebabkan perubahan pada satu atau semua unsur yang lain.

Menurut Fred R. David, (2004:15), Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, dan *joint venture*.

Menurut Mulyadi, (2001:418), Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Dengan tindakan berpola, perusahaan dapat mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif keperwujudan visi organisasi.

Menurut (Yogi, MS, 2007:5), Strategi adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan melihat dan memadukan lingkungan eksternal serta internal sehingga menghasilkan rencana, keputusan dan tindakan yang tepat.

Menurut Husein Umar (2003: 31), Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai

2. Definisi Manajemen Strategis

Menurut (Yogi, MS, 2007:7), Manajemen Strategis merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarahkan perkembangan suatu strategi yang efektif atau strategis untuk mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategis adalah suatu cara bagaimana suatu strategi menentukan sasaran dan membuat keputusan strategis.

3. Manfaat Manajemen Strategi

Menurut (Yogi, MS, 2007: 9), Adapun manfaat manajemen strategi bagi perusahaan diantaranya :

- **Menberi Arah Pencapaian Tujuan Organisasi Perusahaan**

Strategi diawali dengan penentuan dari tujuan perusahaan, dengan demikian dalam melaksanakan manajemen strategi pertama kali perusahaan menentukan tujuan yang akan dicapai. Dari hal tersebut maka dalam manajemen strategi akan memberi arah pada tujuan perusahaan. Dengan arah tersebut maka akan memberi pedoman pada rencana, keputusan dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.

- **Mengantisipasi Perubahan**

Dalam menentukan rencana, keputusan dan tindakan harus didasarkan pada pengamatan dan pemahaman keadaan lingkungan eksternal dan



internal. Pengamatan dan pemahaman tersebut termasuk juga dinamika serta perubahan lingkungan eksternal yang akan dihadapi oleh perusahaan

- **Membantu Memikirkan Kepentingan Berbagai Pihak**

Pengamatan dan pemahaman lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan dalam manajemen strategi akan membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan mafaat lain yaitu meningkatkan keterlibatan berbagai pihak.

- **Meningkatkan Keterlibatan Berbagai Pihak**

Peningkatan keterlibatan berbagai pihak dapat terjadi karena manajemen strategis memikirkan kepentingan setiap pihak yang terlibat, akibatnya mereka akan merasa lebih berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemennya.

- **Menghindari Tumpang Tindih Kegiatan**

Dalam manajemen strategis setiap pihak yang terlibat mengetahui dimana mereka berada dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

- **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi**

Penerapan manajemen strategis yang menghindari tumpang tindih kegiatan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

4. Tahap-Tahap Manajemen Strategis

Menurut Fred R. David, (2004:6), Proses manajemen strategis terdiri dari 3 tahap yaitu :

1. Perumusan Strategi

Perumusan Strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, menentukan kelemahan dan kekuatan organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

2. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan Strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasi sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi Strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Tahapan Manajemen Strategis

Menurut (Yogi, MS, 2007: 11), Penerapan manajemen strategi dalam manajemen perusahaan perusahaan melewati beberapa tahapan. Hal itu sesuai dengan perkembangan dan pemahaman perusahaan akan pentingnya

penerapan manajemen strategis. Tahapan- tahapan manajemen strategis adalah sebagai berikut :

- Anggaran

Anggaran adalah model perencanaan perusahaan yang pertama kali dikenal oleh para manajemen dalam membuat perencanaan perusahaan.

- Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang didasarkan pada pencapaian tujuan. Dalam hal ini manajemen menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, berdasarkan tujuan tersebut lalu perusahaan melakukan analisa kegiatan apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tersebut.

- Perencanaan Strategik

Perencanaan strategik adalah perencanaan yang didasarkan pada keadaan eksternal (peluang dan ancaman) serta internal (kekuatan dan kelemahan). Hal ini berbeda dengan perencanaan jangka panjang yang didasarkan kepada peramalan keadaan yang akan datang. Dalam perencanaan strategis perusahaan berusaha untuk mengamati keadaan eksternal dan internal yang terus berubah. Keadaan itulah yang mendasari perencanaan perusahaan.

- Manajemen Strategik

Dalam manajemen strategi perencanaan lebih diutamakan pada penerapan dalam pelaksanaan dibandingkan pemakaian metode teoritis

tapi kurang sesuai dengan pelaksanaan. Disamping itu, analisis eksternal dan internal untuk menentukan tindakan dilakukan berdasarkan urgensi bukan berdasarkan ritual. Dengan demikian, jika situasi dan kondisi mengharuskan perubahan tindakan perusahaan maka perencanaan harus berubah pada saat itu juga.

6. Tahap-Tahap Proses Perumusan Strategis

Menurut Mulyadi (2001:422), Strategi dirumuskan melalui tujuh langkah utama yaitu :

1. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan dimasa depan.
2. Penentuan Visi, Misi, keyakinan dasar, nilai dasar dan tujuan organisasi.
3. Analisis intern dan Ekstern
4. Analisis Portofolio korporat.
5. Perumusan Peluang dan masalah utama
6. Identifikasi dan evaluasi alternatif strategi.
7. Perumusan Strategi.

7 . Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah menurut pasal 1 angka 26, undang-undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 7, No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah : “Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu“.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 8, No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah : “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan“.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 9, No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah : “Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pegawai swasta sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 10, No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah : “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan”.

1. Pengertian izin Mendirikan Bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan Menurut Keputusan Walikota Palembang No.8 tahun 2005 Pasal 1 : “ Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh walikota, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan reklame.

2. Objek Retribusi Perizinan Bangunan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang No.8 tahun 2005 Pasal 3 yaitu: Objek Retribusi Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Mendirikan Pagar
3. Izin Bangunan Teras Tertutup dan Teras Terbuka
4. Izin Berdandan atau Perbaikan Bangunan
5. Izin Revisi Bentuk dan Ukuran Bangunan
6. Izin Balik Nama dan atau Pemisahan IPB
7. Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan
8. Izin Mendirikan Bangunan Jembatan Toko
9. Izin Mendirikan Bangunan Sarang Walet
10. Izin Mendirikan Bangunan Bertiang
11. Izin Mendirikan Bangunan dan atau lapangan olah raga
12. Izin Bangunan Menara atau Tower
13. Izin Mendirikan Tiang Telpon dan Tiang Listrik

14. Izin Bangunan Monumen dan Tugu yang sifatnya Komersial tinggi maximum 10 meter
15. Izin Bangunan Utilitas Umum jaringan primer dan sekunder
16. Izin Mendirikan Media Reklame
17. Surat Keterangan Rencana Kota
18. Izin Kelayakan Penggunaan Bangunan
19. Sewa tanah milik Pemerintah untuk sarana media luar ruang
20. Plat IMB
21. Plat IPB

3. Dasar Pengenaan Retribusi Perizinan Bangunan.

Retribusi Izin Mendirikan Pasal 4 Penetapan Retribusi Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Luas Bangunan

Luas Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 keputusan ini, adalah luas bangunan yang dimohonkan perizinan bangunannya, sesuai dengan gambar yang diajukan.

2. Indeks Kualifikasi Jalan.

Indeks Klasifikasi Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 2 keputusan ini, adalah indeks pengali dari pada letak objek bangunan berdasarkan kelas jalan dan jenis bangunan.

3. Tarif Harga Dasar Bangunan

Tarif Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 3 keputusan ini, adalah tarif yang didasarkan pada pedoman harga satuan bangunan gedung dalam Daerah.

4. Indeks Zona

Indeks Zona sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 4 keputusan ini, adalah besar angka penggali dari letak objek bangunan sesuai dengan pembagian wilayah Daerah terdiri dari Zona A, Zona B, Zona C, Zona D dan Zona E.

5. Indeks Ketinggian

Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 5 keputusan ini, adalah besaran angka pengali dengan klasifikasi ketinggian bangunan meliputi :

- Bangunan Rendah (1 s/d 4 lantai)
- Bangunan Sedang (5 s/d 8 lantai)
- Bangunan Tinggi (diatas 8 lantai)

4. Tarif Retribusi Perizinan Bangunan

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang No.8 tahun 2005 tarif retribusi perizinan bangunan adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tower adalah Rp.1.000.000,-/ meter tinggi dari dasar tanah.

2. Retribusi Izin Mendirikan Tiang Telepon dan Tiang Listrik adalah Rp.2.500,- per tiang.
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Monumen atau Tugu yang sifatnya komersial dengan tinggi maksimal 10 meter adalah Rp.200.000,- meter persegi.
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Utilitas umum Jaringan Primer dan Sekunder adalah Rp.2.500,- per meter maju.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Menurut Sugiyono (2004:5) jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, metode/pendekatan, tingkat ekplanasi dan analisis dan jenis data. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian menurut metode.

Menurut metodenya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penelitian Survei

Kerlinger (1973) mengemukakan bahwa penelitian survei adalah jenis penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relative dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

2. Penelitian *Ex Post Facto*

Penelitian *Ex Post Facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi kemudian yang menurut kebelakang untuk mengetahui faktor- faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

3. Penelitian Eksperimen

Penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat.

4. Penelitian Naturalistik

Metode penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah sebagai eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif.

5. *Polcy Resetch* (Penelitian Policy)

Polcy Resetch (penggunaan metode penelitian kebijakan) dimulai karena adanya masalah dan masalah ini pada umumnya dimiliki para manajer atau para pengambil keritutusan pada suatu organisasi, Majchrzak (1984) mendefinisikan *Polcy Resetch* adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam penyelesaian masalah.

6. *Action Resech* (Penelitian Tindakan)

Penelitian tindakan adalah suatu proses yang dilalui oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan jawaban, melaksanakan prosedur ini. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah (1) situasi, (2) perilaku, (3) organisasi tennasuk struktur kerja, iklim kerja dan pranata.

7. Penelitian Evaluasi

Dalam hal Khusus, penelitian evaluasi dapat dinyatakan sebagai evaluasi tetapi dalam hal ini juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini dapat merupakan bagian dari proses pembuat keputusan, yaitu membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena.

8. Penelitian Sejarah

Penelitian sejarah berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung dimasa lalu.

Berdasarkan analisis data, jenis penelitian penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian Tindakan (*Action Resech*). Karena tujuan dalam penelitian ini mengubah keadaan atau situasi yang terjadi pada unit penelitian yang dianggap perlu terjadinya perubahan.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian pada Dinas Tata Kota yang beralamat di Jalan Slamet Riadi No.14 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- b) Struktur organisasi
- c) Pembagian tugas.
- d) Data Anggaran dan Realisasi
- e) Strategi yang digunakan oleh Dinas Tata Kota

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut W. Gulo (2002:115), ada beberapa cara pengumpulan data, yaitu:

1. Pengamatan (observasi)

Yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara (interview)

Yaitu cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab dengan objek yang diteliti.

4. Penggunaan quisioner (angket)

Yaitu cara pengumpulan data dengan daftar pertanyaan (angket) yang dikirim kepada responden.

5. Dokumenter

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalain penelitian ini adalah teknik Wawancara dan teknik Dokumen. teknik wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan dan karyawan yang

dianggap dapat memberi data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik dokumen yaitu berupa tabel-tabel mengenai penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan biaya pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

a. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2004:14) terdiri dari :

1. Analisis Kuantitatif/yaitu suatu metode analisis yang menggunakan data yang diperoleh dari bentuk angka-angka.
2. Analisis Kualitatif, yaitu suatu analisis dengan menggunakan data dalam bentuk penjelasan.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis data Kualitatif, di mana Analisa kualitatif berbentuk penjelasan-penjelasan mengenai Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Palembang dalam upaya meningkatkan pendapatan

b. Teknik Analisis

Sedangkan teknis analisis yaitu dengan cara menguraikan tahap-tahap strategi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

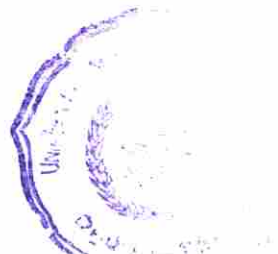
1. Gambaran Singkat Dinas Tata Kota Kota Palembang

Semulanya pada tahun 1937 oleh Ir. Karsten sebagai ahli rencana kota sudah direncanakan sebuah kota yang disebut Rencana Karsten, rencana tersebut ditetapkan dengan rencana Bergemesster Palembang pada tanggal 7 Desember 1937 Nomor. 256.

Pokok-pokok ide yang diletakkan dalam rencana itu sebagian besar ditujukan untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda dan modal-modal asing yang ada dikota ini. Karena itu sedikit sekali kalau dikatakan ada terdapat dalam rencana itu yang ditujukan untuk kepentingan penduduk warga kota Indonesia umumnya.

Mengingat terjadinya perubahan-perubahan baik dalam cara berfikir maupun tingkat penghidupan yang dialami oleh masyarakat kota Palembang dan Pemerintah yang tidak sejalan lagi dengan pokok-pokok pikiran dan ide Rencana Karsten itu, maka pada tahun 1949 oleh Pemerintah Federal diadakan usaha meninjau kembali Rencana Karsten dengan menunjuk Ir. Lunning sebagai perencana kota baru.

Ir. Lunning pada pokoknya juga membuat rencana kota dengan mengambil garis-garis besar Rencana Kasrten sebagai pedoman, dan disana-sini diadakan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan kota yang ada pada saat itu. Rencana itu disebut Rencana Lunning, pada prinsipnya disetujui oleh



Dewan Pemerintah Kota Besar Palembang dalam tahun 1951. akan tetapi oleh Rencana Lunning ini belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota

Dalam hubungan inilah Pemerintah Daerah Kotapraja pada tahun 1958 dengan bantuan jawatan Planologi membentuk rencana kota baru, dengan meletakkan sebagai dasar pokok ide yaitu :

1. Rencana yang disusun adalah rencana umum yang sebagai dasar untuk rencana-rencana khusus selanjutnya tentu saja tidak terlalu mengikat dan ditujukan untuk sebesar-besarnya daya upaya yang memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai suatu susunan kota yang dapat menjamin kearah kebahagiaan dan kejayaan hidup bagi masyarakat turun-temurun, karena diharapkan rencana kota ini dapat menampung perkembangan masa lebih dari 50 tahun.
2. Dalam rencana kota ini, sebagai suatu perencanaan ruang dicarikan ikatan kesatuan yang harmonis antara 2 faktor yaitu :
 - a. Pergaulan hidup dilihat sebagai keseluruhan dari hubungan kegiatan manusia.
 - b. Ruangan yang dilihat sesuatu yang diketahui dari ilmu bumi dan sejarah
2. Perencanaan adalah suatu dasar esensial untuk perkembangan masyarakat dan untuk perkembangan dan pergaulan hidup.

Agar dapat mencapai suatu tujuan ini atau tujuan yang dimaksud dan manfaat sebesar mungkin, maka dalam keadaan manapun hendaknya

diseimbangkan secara teliti kebutuhan atau syarat-syarat dari pergaulan hidup dengan sifat-sifat yang bersangkutan.

Bila dilihat dari perkembangan sejarah dan pembentukan Peraturan Bangunan Kota Palembang tersebut diatas, maka dapatlah kita perhatikan bahwa perencanaan tata ruang suatu kota adalah merupakan soal kemasyarakatan

Dalam rangka reorganisasi tubuh Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang demi tercapainya efisiensi kerja, khususnya dalam rangka pelaksanaan Detai Plan Rencana Induk Kota, serta untuk pelaksanaan sebaik-baiknya program kerja lima tahun maka Pemerintah Kota Palembang, perlu membentuk Dinas Tata Kota Kota Palembang.

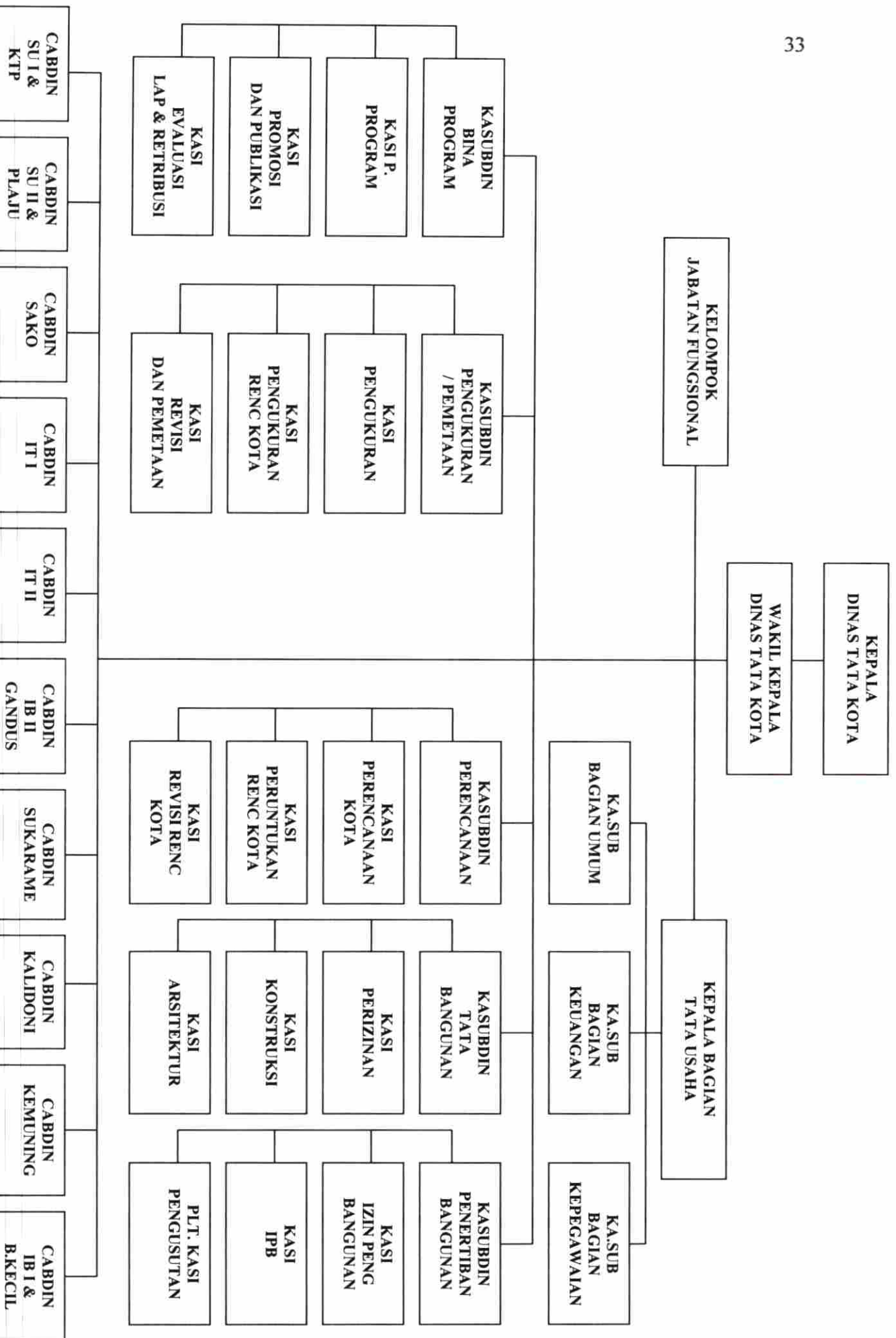
Mengingat hal tersebut diatas, maka Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 37/ UM/ WK/ 1974 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Kota Palembang. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dari Dinas Tata Kota Kota Palembang, sebagai berikut :

1. Kedudukan Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah merupakan aparat teknik Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Walikota.
2. Tugas Pokok Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah mengatur pelaksanaan pembangunan fisik planologi dan tata ruang kota di Daerah hukum Pemerintah Daerah Kotamadiya Palembang.

3. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Penelitian, yaitu sebagai usaha dan kegiatan yang diperlukan dibidang penelitian, guna mengatasi masalah perkembangan dan penyelenggaraan pembangunan fisik planologi dan tata ruang kota, berupa survey dan pengumpulan data fisik serta pemetaan-pemetaan kota berikut evaluasi dan model dengan maksud agar dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan atau penindakan yang meliputi peninjauan, penelaahan, penyajian dan penyusunan hasil.
 - b. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan yang diperlukan guna merencanakan perkembangan dan pembangunan fisik planologi dan tata ruang kota menjadi rencana terperinci (Detail Plan) berdasarkan pedoman rencana induk (Master Plan)
 - c. Pengawasan, yaitu segala usaha dan tindakan yang dilakukan guna terlaksananya pengarahannya dan penelitian dalam pelaksanaan pembangunan fisik planologi dan tata ruang kota, yaitu meliputi pemberian petunjuk, pemeriksaan, pengusutan dan penindakan.

2. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tata Kota Kota Palembang memiliki struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut:



3. Uraian Tugas Dinas Tata Kota Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palembang tentang uraian tugas Dinas Tata Kota Kota Palembang sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tata Kota

Kepala Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang tata kota dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. memimpin kegiatan dan urusan Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala-Kepala Sub Dinas yang ada dalam lingkungannya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- b. merumuskan kebijaksanaan operasional/pembangunan daerah di bidang Tata Kota.
- c. melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- d. mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah, tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas Tata Kota mempunyai tugas mengkoordinir urusan perencanaan, pembinaan, kepegawaian, keuangan dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. mengkoordinasikan kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
- c. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- d. Menjalankan tugas dan fungsi Kepala Dinas sehari-hari apabila Kepala Dinas berhalangan atau berada di luar Daerah berdasarkan surat penunjukkan Kepala Daerah.
- e. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- f. Meneliti dan mengawasi seluruh proses perizinan yang menjadi tugas Dinas dari menentukan masukan kepada Kepala Dinas.

3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengelolaan urusan umum dan pelayanan masyarakat.
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan.

3.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. mencari, menghimpun dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. melakukan koordinasi dengan Unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. melakukan urusan surat menyurat.
- f. melakukan urusan pelayanan masyarakat dalam hal administrasi permohonan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), Advice Planning (Keterangan Rencana Kota), Peruntukkan Penggunaan Tanah, Perubahan Peruntukkan Penggunaan Tanah, Reklame dan Pelegalisiran Izin.
- g. melakukan urusan kearsipan.
- h. melakukan pengetikan dan penggandaan surat-surat dan naskah dinas lainnya.
- i. melakukan urusan perlengkapan.
- j. melaksanakan urusan perjalanan Dinas.
- k. melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas.
- l. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan peningkatan karier.

- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- n. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.

3.2 Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf, agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. menyiapkan usul perencanaan/pengadaan kebutuhan pegawai.
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai.
- e. menyiapkan usul mutasi pegawai.
- f. melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
- g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
- h. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan peningkatan karier.

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

3.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf, agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. menyusun rencana anggaran pembiayaan.
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. melakukan koordinasi dengan Unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan peningkatan karier.

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.

4. Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengumpulan data dan informasi, penyusunan rencana program, promosi dan publikasi, melaksanakan tata ruang, site plan dan guide plan, menyusun laporan, evaluasi retribusi pada Dinas Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Binas Bina Program mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dari permohonan keterangan rencana kota, IMB dan sumber data lainnya dan menyusun laporan.
- b. menyusun dan melaksanakan program jangka pendek, menengah dan panjang, anggaran rutin dan pembangunan
- c. menyusun dan melaksanakan pengembangan kawasan perkotaan, tata ruang kota, site plan.
- d. melaksanakan penelitian rutin rencana kota, baik yang melalui permohonan rutin rencana kota maupun akibat perubahan pembangunan.

- e. melakukan evaluasi retribusi IMB, IPB, pengukuran, cetak peta, reklame, penggunaan lahan, perubahan peruntukkan dan retribusi lain yang berhubungan dengan Dinas Tata Kota dan menyusun pertanggungjawaban.
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Seksi Penyusunan Program

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program jangka pendek, menengah dan panjang, anggaran rutin dan pembangunan.

4.2. Seksi Promosi dan Publikasi

Seksi Promosi dan Publikasi mempunyai tugas menyusun rencana kota, melaksanakan penelitian rencana kota baik yang melalui permohonan keterangan rencana kota maupun akibat perubahan pembangunan serta melakukan promosi, publikasi dan hubungan masyarakat.

4.3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi

Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dari permohonan keterangan rencana kota, IMB serta sumber data lainnya guna dievaluasi dan tindak lanjut serta melakukan penarikan retribusi dan penyusunan pertanggungjawaban.

5. Sub Dinas Pengukuran/Pemetaan

Sub Dinas Pengukuran/Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengukuran/pemetaan, pemetaan baru dan revisi serta pematokan rencana kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Dinas Pengukuran/Pemetaan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengukuran/pemetaan terhadap lokasi yang dimohonkan keterangan rencana kota baru atau revisi peta.
- b. melaksanakan pengukuran/pemetaan baik secara konvensional maupun dengan photo udara atau satelit, karena adanya perubahan fisik permukaan bumi yang diakibatkan oleh pembangunan.
- c. melaksanakan pematokan rencana kota baik posisi horizontal maupun vertical.

5.1. Seksi Pengukuran

Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pengukuran permohonan keterangan rencana kota, baik perorangan maupun instansi pemerintah dan swasta.

5.2. Seksi Pemetaan Baru dan Revisi

Seksi Pemetaan Baru dan Revisi mempunyai tugas melaksanakan pemetaan baru baik dengan cara konvensional maupun dengan photo udara

atau satelit dan merevisi peta-peta yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada akibat dari kegiatan pembangunan.

5.3. Seksi Pematokan Rencana Kota

Seksi Pematokan Rencana Kota mempunyai tugas melaksanakan pemasangan patok untuk menentukan posisi Horizontal dan Vertikal.

6. Sub Dinas Perencanaan Kota

Sub Dinas Perencanaan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Dinas Perencanaan Kota mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembuatan, revisi dan peninjauan kembali Rencana Detail/Teknis Ruang Kota.
- b. melakukan penerapan peruntukkan rencana kota pada peta situasi berdasarkan hasil pengukuran.
- c. melakukan penerapan peruntukkan rencana kota pada peta situasi berdasarkan penerapan rencana kota setempat.
- d. menyelenggarakan pembuatan rencana tapak (Site Plan) suatu kawasan.
- e. membantu pelaksanaan proses peninjauan kembali rencana kota suatu persil/kawasan.

- f. menentukan besaran pemungutan biaya penggunaan lahan di atas luas 5000m^2 ;
- g. menentukan pungutan biaya perubahan peruntukkan lahan.
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6.1. Seksi Perencanaan Kota

Seksi Perencanaan Kota mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kota pada kawasan baru, menerapkan rencana kota pada peta situasi suatu persil atau kawasan yang dimohonkan surat keterangan rencana kota.

6.2. Seksi Peruntukan Rencana Kota

Seksi Peruntukan Rencana Kota mempunyai tugas menetapkan peruntukan rencana kota, jenis bangunan, intensitas dan ketinggian bangunan pada suatu persil atau kawasan.

6.3 Seksi Revisi Rencana Kota

Seksi Revisi Rencana Kota mempunyai tugas melakukan revisi rencana kota pada suatu persil/kawasan, memberikan masukan terhadap permohonan peninjauan kembali rencana kota serta melaksanakan pembuatan rencana tapak (site plan).

7. Sub Dinas Tata Bangunan

Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan dalam perencanaan, pelaksanaan

dan perkembangan dari pembangunan fisik bangunan, kawasan planologi kota serta pembuatan, penempatan dan pemasangan reklame/iklan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan peraturan Izin Mendirikan Bangunan yang mencerminkan bimbingan yang tegas dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. melaksanakan pengawasan teknis dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. menyelenggarakan dan memproses permohonan izin Mendirikan Bangunan dan Izin Pemasangan Reklame baik segi teknis maupun administrasi.
- d. melaksanakan penelitian dan memeriksa perhitungan konstruksi bangunan bertingkat atau yang berkonstruksi berat.
- e. menyelenggarakan penelitian letak bangunan, bentuk bangunan, ketinggian bangunan, tata ruang bangunan, penampilan bangunan, dimensi ruang serta kelengkapan utilitas bangunan yang diisyaratkan agar dapat memenuhi persyaratan, kesehatan lingkungan, pengguna bangunan, keselamatan bangunan dan pengguna bangunan berdasarkan rencana kota yang ditetapkan dan diisyaratkan.
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7.1. Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan dan memproses permohonan izin mendirikan bangunan dan izin pemasangan reklame baik segi teknik maupun segi administrasi.

7.2. Seksi Konstruksi

Seksi Konstruksi mempunyai tugas melakukan penelitian dan pemeriksaan perhitungan konstruksi bangunan bertingkat dan bangunan yang berkonstruksi berat (bangunan yang menggunakan konstruksi rangka baja atau rangka kayu).

7.3. Seksi Arsitektur

Seksi Arsitektur mempunyai tugas melakukan penelitian/memeriksa, merekomendasikan letak bangunan, bentuk bangunan, ketinggian bangunan, tampak bangunan, tata ruang bangunan, dimensi ruang, penampilan bangunan serta kelengkapan utilitas bangunan yang dipersyaratkan, agar dapat memenuhi persyaratan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan pengguna bangunan yang diisyaratkan, sesuai terhadap rencana kota yang telah ditetapkan dan diisyaratkan serta pembuatan, penempatan dan pemasangan reklame/iklan dipandang dari aspek fungsi dan estetika bangunan.

8. Sub Dinas Penertiban Bangunan

Sub Dinas Penertiban Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penertiban bangunan, memproses Izin

Penggunaan Bangunan, mengadakan tindakan preventif maupun represif terhadap penyimpangan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan, pengecekan kebenaran pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Dinas Penertiban Bangunan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan dan memproses permohonan izin penggunaan bangunan baik teknis maupun administrasi.
- b. melakukan penertiban bangunan-bangunan yang telah memiliki izin pelaksanaan bangunan.
- c. melakukan penertiban dan pengawasan terhadap izin penggunaan bangunan.
- d. melaksanakan pencegahan kepada anggota masyarakat yang melaksanakan pembangunan yang melanggar ketentuan izin yang diberikan.
- e. melakukan penelitian kebenaran pengaduan.
- f. melakukan pengusutan atas pelanggaran terhadap izin yang diberikan.
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8.1. Seksi Penggunaan Bangunan

Seksi Penggunaan Bangunan mempunyai tugas memproses Izin Penggunaan Bangunan baik segi teknis maupun administrasi, melakukan pengawasan terhadap penggunaan bangunan dan mengadakan tindakan baik preventif maupun represif dengan penyampaian surat-surat peringatan.

Tabel. II. 2
Realisasi Penerimaan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan
Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang

Bulan	Penerimaan perbulan 2005	Penerimaan perbulan 2006
Januari	Rp. 719.725.700,-	Rp. 1.090.171.600,-
Februari	Rp. 897.558.800,-	Rp. 522.934.100,-
Maret	Rp. 1.245.294.200,-	Rp. 1.365.533.200,-
April	Rp. 1.180.802.400,-	Rp. 655.250.050,-
Mei	Rp. 2.731.741.500,-	Rp. 1.190.974.100,-
Juni	Rp. 2.238.667.900,-	Rp. 1.057.715.500,-
Juli	Rp. 1.780.704.400,-	Rp. 1.452.312.100,-
Agustus	Rp. 1.635.597.900,-	Rp. 1.982.324.700,-
September	Rp. 1.164.543.900,-	Rp. 801.695.300,-
Oktober	Rp. 1.102.723.850,-	Rp. 445.162.800,-
Nopember	Rp. 1.700.592.450,-	Rp. 1.154.449.800,-
Desember	Rp. 883.234.400,-	Rp. 806.867.500,-
Total	Rp. 17.281.187.400,-	Rp. 12.523.390.750,-

Sumber : Dinas Tata Kota Kota Palembang Tahun 2005-2006

Dari tabel dapat dilihat bahwa Penerimaan bulanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang naik turun. Pada tahun 2005 penerimaan tertinggi pada bulan mei sebesar Rp. 2.731.741.500,- dan penerimaan terendah pada bulan januari sebesar Rp.719.725.700,- sedangkan pada tahun 2006 penerimaan tertinggi pada bulan agustus sebesar Rp. 1.190.171.600,- dan penerimaan terendah pada bulan oktober sebesar Rp. 445.162.800,-. Anggaran Retibusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2005 sebesar Rp 19.000.000.000,- dan realisasi

penerimaannya sebesar Rp 17.281.187.400,- pada tahun 2006 sebesar Rp 22.500.000.000,- dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 12.523.390.750,-

Berdasarkan tabel diatas penerimaan Dinas Tata Kota Kota Palembang pada tahun 2005 dan 2006 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang.

Tabel. III. 1
Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang

Bulan	Target/Anggaran perbulan Tahun 2005	Penerimaan perbulan Tahun 2005
Januari	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 719.725.700,-
Februari	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 897.558.800,-
Maret	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 1.245.294.200,-
April	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 1.180.802.400,-
Mei	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 2.731.741.500,-
Juni	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 2.238.667.900,-
Juli	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 1.780.704.400,-
Agustus	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 1.635.597.900,-
September	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 1.164.543.900,-
Oktober	Rp.15.350.000.000,-	Rp. 1.102.723.850,-
Nopember	Rp.19.000.000.000,-	Rp. 1.700.592.450,-
Desember	Rp.19.000.000.000,-	Rp. 883.234.400,-
Total Realisasi Retribusi IMB		Rp. 17.281.147.400,-

Sumber : Dinas Tata Kota Kota Palembang Tahun 2005

Dari tabel diatas dapat kita lihat Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Tata Kota Kota Palembang untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 17.281.147.400,-

Tabel. III. 2
 Realisasi Penerimaan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan
 Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang

Bulan	Target/Anggaran perbulan Tahun 2006	Penerimaan perbulan Tahun 2006
Januari	Rp.22.500.000.000,-	Rp. 1.090.171.600,-
Februari	Rp.19.000.000.000,-	Rp. 522.934.100,-
Maret	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 1.365.533.200,-
April	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 655.250.050,-
Mei	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 1.190.974.100,-
Juni	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 1.057.715.500,-
Juli	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 1.452.312.100,-
Agustus	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 1.982.324.700,-
September	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 801.695.300,-
Oktober	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 445.162.800,-
Nopember	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 1.154.449.800,-
Desember	Rp. 22.500.000.000,-	Rp. 806.867.500,-
Total Realisasi Retribusi IMB		Rp. 12.523.390.750

Sumber : Dinas Tata Kota Kota Palembang Tahun 2006

Dari tabel diatas dapat dilihat Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Tata Kota Kota Paelmbang untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp. 12.523.390.750,-

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada bab satu maka strategi manajemen retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang dapat dilakukan melalui tahap-tahap manajemen strategis dan dengan anggaran, realisasi izin mendirikan bangunan

1. Strategi Manajemen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Tata Kota Kota Palembang..

a. Strategi Manajemen yang digunakan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yaitu :

1) Perumusan Strategi Manajemen.

Perumusan Strategi Dinas Tata Kota Kota Palembang tercantum pada Rencana Strategis Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Rencana Strategis Jangka Pendek Dinas Tata Kota Kota Palembang

a) Isu-isu Strategik Dinas Tata Kota Kota Palembang :

- 1) Tersedianya rencana tata ruang kota yang ideal dan peningkatan pelayanan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang kota secara menyeluruh.
- 3) Memasang Blow Block terhadap rencana tata ruang kota secara keseluruhan untuk realisasikan guna pengembangan wilayah.
- 4) Sosialisasi secara global potensi daerah.

b) Visi Dinas Tata Kota Kota Palembang :

Mewujudkan penataan kota yang ideal dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan prima serta keterpaduan sistem.

c) Misi Dinas Tata Kota Kota Palembang :

- 1) Menyusun dan mengimplementasikan rencana tata ruang kota yang serasi, selaras dan seimbang.
- 2) Menyusun dan melaksanakan sumber informasi yang diperoleh oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang dan pedoman pembangunan kota secara lengkap.
- 3) Mensosialisasikan rencana tata ruang kota dan izin mendirikan bangunan secara transparan.
- 4) Meningkatkan teknis dan prosedur pelayanan.
- 5) Menertiban pembangunan fisik kota dengan pengawasan secara berkesinambungan.

d) Tujuan Dinas Tata Kota Kota Palembang :

- 1) Memfungsikan dan mengimplementasikan penggunaan ruang bagian wilayah kota secara optimal.
- 2) Penggunaan ruang wilayah kota dan pedoman pengisian ruang wilayah kota secara berkesinambungan untuk dijadikan dasar bagi tertib pengaturan ruang secara terperinci dalam penyusunan program pembangunan kota jangka menengah maupun program tahunan pada tiap kawasan peruntukan dalam bagian wilayah kota yang diprioritaskan.

- 3) Agar dalam pembangunan fisik dilapangan adanya mata keterpaduan sistem antar pelaku pembangunan.
 - 4) Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- e) Sasaran Dinas Tata Kota Kota Palembang :
- 1) Penyusunan rencana tata ruang kota yang telah disahkan.
 - 2) RDTRK dan RTRK dapat dilaksanakan dilapangan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga dapat tertata dengan baik.
 - 3) Pemasangan Blow Block pembutan Billboard, RTRW, RDTRK, RTRK untuk setiap kecamatan.
 - 4) Sebagai acuan untuk pelayanan rencana tata ruang, IMB, penggunaan lahan, izin penggunaan bangunan, izin reklame.

Rencana Strategis Jangka Menengah Dinas Tata Kota Kota Palembang

- a) Isu-isu Strategik Dinas Tata Kota Kota Palembang :
1. Tersedianya rencana tata ruang kota yang ideal dan peningkatan pelayanan.
 2. Sosialisasi secara global potensi daerah.
 3. Melengkapi peta dasar kota palembang secara menyeluruh, akurat dan modern.
 4. Menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang kota secara menyeluruh.

5. Memasang Blow Block terhadap rencana tata ruang kota secara keseluruhan untuk realisasikan guna pengembangan wilayah.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana menuju pelayanan yang prima serta melakukan promosi, publikasi hubungan masyarakat secara berkesinambungan hingga setiap bangunan memiliki IMB.
7. Menyusun dan melaksanakan peta tematik Kota Palembang seperti drainase, transportasi, ruang terbuka hijau, dll.

b) Visi Dinas Tata Kota Kota Palembang :

Mewujudkan penataan kota yang ideal dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan prima serta keterpaduan sistem.

c) Misi Dinas Tata Kota Kota Palembang :

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan rencana tata ruang kota yang serasi, selaras dan seimbang.
- 3) Menyusun dan melaksanakan sumber informasi dan pedoman pembangunan kota secara lengkap.
- 4) Mensosialisasikan rencana tata ruang kota dan izin mendirikan bangunan secara transparan.
- 5) Meningkatkan teknis dan prosedur pelayanan.
- 6) Menertibkan pembangunan fisik kota dengan pengawasan secara berkesinambungan.

d) Tujuan Dinas Tata Kota Kota Palembang

- 1) Peningkatan dan pengembangan SDM dalam pelayanan rencana tata ruang dan IMB guna kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan rencana tata ruang kota yang serasi, selaras dan seimbang fungsi dan intensitas penggunaan ruang bagian wilayah kota secara optimal.
- 3) Menyusun dan melaksanakan sumber informasi penggunaan ruang wilayah kota dan pedoman pengisian ruang wilayah kota secara berkesinambungan untuk dijadikan dasar bagi tertib pengaturan ruang secara rinci dalam penyusunan program pembangunan kota jangka menengah maupun program tahunan pada tiap kawasan peruntukan bagian yang diprioritaskan.

e) Sasaran Dinas Tata Kota Kota Palembang :

Dalam rangka pelaksanaan program jangka menengah Dinas Tata Kota akan didapat :

- 1) Staf Dinas Tata Kota 90% telah profesional dalam bidang tugasnya.
- 2) Pembuatan peta garis dan penyusunan rencana tata ruang kota seluruh kota yang telah disahkan 100% selesai.
- 3) RDTRK dan RTRK dapat dilaksanakan dilapangan oleh masyarakat 30% dan pemerintah 40% sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas dan daerah kumuh sampai 40%.



- 4) Pemasangan Blow Block pembuatan Billboard, RTRW, RDTRK, RTRK untuk setiap kecamatan 80% selesai.

Rencana Strategis Jangka Panjang Dinas Tata Kota Kota Palembang :

a) Isu-isu Strategik Dinas Tata Kota Kota Palembang :

- 1) Tersedianya rencana tata ruang kota yang ideal dan peningkatan pelayanan.
- 2) Sosialisasi secara global potensi daerah.
- 3) Melengkapi peta dasar kota Palembang secara menyeluruh, akurat dan modern.
- 4) Menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang kota secara menyeluruh.
- 5) Memasang Blow Block terhadap rencana tata ruang kota secara keseluruhan untuk realisasikan guna pengembangan wilayah.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana menuju pelayanan yang prima serta melakukan promosi, publikasi hubungan masyarakat secara berkesinambungan hingga setiap bangunan memiliki IMB.
- 7) Menyusun dan melaksanakan peta tematik Kota Palembang seperti drainase, transportasi, ruang terbuka hijau, dll.

b) Visi Dinas Tata Kota Kota Palembang :

Mewujudkan penataan kota yang ideal dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan prima serta keterpaduan sistem.

berkesinambungan hingga setiap bangunan memiliki izin mendirikan bangunan.

- 5) Menyusun dan melaksanakan tata tematik kota Palembang seperti drainase, transportasi, ruang terbuka hijau, terminal dll.
 - 6) Melaksanakan komputerisasi dan gis guna pelayanan IMB, advice planning, rencana tata ruang kota dan potensi daerah.
 - 7) Deregulasi pelayanan IMB.
- e) Sasaran Dinas Tata Kota Kota Palembang :
- 1) 45% SDM sebagai tenaga profesional pada bidang tugas masing-masing.
 - 2) Kawasan telah tersusun dari luas wilayah kota.
 - 3) Pemasangan Blow Block, Billboard pada setiap kawasan kecamatan untuk RTRK.
 - 4) 60% bangunan telah memiliki IPB, IPT, advice planing.
 - 5) 30% data rencana tata ruang kota , IMB, IPB, lokasi reklame, infrastruktur dan utilitas sudah dalam format digital.

2). Pelaksanaan Strategi Manajemen.

Pelaksanaan Strategi sering disebut tahap tindakan dalam manajemen strategis, yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang pada tahap pelaksanaan strategi berdasarkan Rencana strategis Jangka Pendek, Jangka Menengah, Jangka Panjang :

Pelaksanaan Strategi pada Jangka Pendek yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah :

- a). Pembuatan peta garis Kota Palembang secara menyeluruh.
- b). Penyusunan RTRK secara menyeluruh.
- c). Digital dan publikasi rencana tata ruang kota, IMB, IPB, lokasi reklame, infrastruktur dan utilitas.

Pelaksanaan Strategi pada Jangka Menengah yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah :

- a). Pembuatan peta garis Kota Palembang secara menyeluruh.
- b). Penyusunan RTRK secara menyeluruh.
- c). Digital dan publikasi rencana tata ruang kota, IMB, IPB, lokasi reklame, infrastruktur dan utilitas.
- d). Pemasangan Bouw Block untuk transportasi perdagangan.
- e). Penyusunan peta tematik.
- f). Penyusunan pengembang kawasan strategis yang dipacu dan berpotensi.

Pelaksanaan Strategi pada Jangka Panjang yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah :

- a) Diklat bidang :
- b) Penyusunan RTRK, RDTRK kawasan.
- c) Pelayanan pemasangan Bouw Block pada wilayah yang sudah tersusun RTRK.
- d) Pelaksanaan pendataan bangunan dan program pemutihan IPB/IMB.
- e) Formatisasi data rencana ruang kota, IMB, IPB, Lokasi reklame, infrastruktur dan utilitas sudah dalam format digital.

3). Evaluasi Strategi Manajemen.

Evaluasi Strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Dalam pelaksanaannya pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang mendapatkan hasil yang optimal karena itu dibutuhkannya evaluasi manajemen Dinas Tata Kota Kota Palembang yang berdasarkan Rencana Strategis Jangka Pendek, Jangka Menengah, Jangka Panjang Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah :

- a) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. walaupun telah dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap SDM yang dimiliki namun kenyataannya masih saja kurangnya pengawasan dilapangan dan masih sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengawas dilapangan.
- b) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang yang belum optimal menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi izin mendirikan bangunan.
- c) Menertibkan pembangunan fisik kota dengan pengawasan secara berkesinambungan. didalam menertibkan bangunan yang ada masih terjadi penyimpangan karena bangunan tersebut tidak sesuai yang direncanakan baik dari segi luas bangunan dan keindahan kota dan dalam pelaksanaan penertiban masih terjadi tebang pilih dalam menertibkan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang.

Dinas Tata Kota Kota Palembang dalam Rencana tindakan yang diambil harus saling mendukung satu sama lain, rencana yang dipilih dapat dicapai meskipun berisi tantangan, rencana yang dipilih akan dapat mewujudkan peluang dan menyelesaikan masalah utama dan mengarah keisu strategi utama, mampu menyelesaikan kendala ataupun masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang itu sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proses pengambilan keputusan yang Dilakukan Oleh Dinas Tata Kota harus menjamin, bahwa setiap alternatif memenuhi kriteria tersebut, supaya dapat memilih satu strategi untuk keputusan strategi perusahaan jangka panjang yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang.

Berdasarkan strategi-strategi manajemen yang telah diuraikan diatas yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi strategi tersebut diatas diharapkan strategi manajemen retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang dapat terkendali sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang dan meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang dalam upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu :

- a. Sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak intern Dinas Tata Kota Kota Palembang dalam melaksanakan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Kurang memadainya SDM dalam hal pengawasan pembangunan dilapangan.
- c. Kurangnya ketegasan dari pihak Dinas Tata Kota terhadap pelanggaran dalam Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
- d. Masyarakat juga menilai prosedur pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Yang terlalu berbelit-belit dan maraknya calo-calo dalam mengurus sertifikat Izin Mendirikan Bangunan.
- e. Masyarakat belum terlalu menyadari akan gunanya retribusi izin mendirikan bangunan dalam pembangunan, masyarakat berpendapat bahwasanya izin mendirikan bangunan belum terlalu berguna bagi masyarakat itu sendiri akan tetapi mengingat fungsi utama jasa perizinan tersebut dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- f. Dalam prosedur membuat Izin Mendirikan Bangunan sering kali memakan waktu yang panjang sampai membutuhkan waktu 29 hari

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab empat maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk strategi manajemen Retibusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Tata Kota Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan baik. Dinas Tata Kota Kota Palembang sudah menggunakan strategi manajemen yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi strategi. Tetapi pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang
 - 1 Sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak intern Dinas Tata Kota Kota Palembang.
 2. Kurang memadainya SDM dalam hal pengawasan pembangunan dilapangan.
 3. Kurangnya ketegasan dari pihak Dinas Tata Kota terhadap pelanggaran dalam Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
 4. Maraknya calo-calo dalam mengurus sertifikat Izin Mendirikan Bangunan.
 5. Masyarakat belum terlalu menyadari akan gunanya retribusi izin mendirikan bangunan dalam pembangunan.

6. Dalam prosedur membuat Izin Mendirikan Bangunan sering kali memakan waktu yang lama.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti memberi saran dalam strategi manajemen pemungutan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah sebagai berikut ini :

1. Mengupayakan pelayanan yang efektif dan efisien dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Memberi tanda kepada bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
3. Memberi sanksi yang tegas kepada petugas yang melakukan penyimpangan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan pada saat pengawasan dan masyarakat yang melanggar dan tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
4. Dinas Tata Kota Kota Palembang harus melakukan pengawasan, pelaksanaan, pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan secara rutin.
5. Untuk menghindari maraknya calo-calo Izin Mendirikan Bangunan harus diterapkan konsep baru yaitu setiap masyarakat yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan tidak boleh diwakili walaupun diwakili maka pengurusnya harus memperlihatkan surat kuasa.

lamanya dalam mengurus keterangan Izin Mendirikan Bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. Sesuai dengan ketentuan yang ada kegunaan izin mendirikan bangunan memberi manfaat bagi masyarakat baik dari segi keselamatan yang menempati bangunan tersebut dan keindahan tata ruang kota itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Fred R David. 2001. **Manajemen Strategi**, Jakarta.

Gulo, W. 2002. **Metode Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta

Keputusan Walikota Palembang No.08 Tahun 2005 Tentang Tarif Retribusi Perizinan Bangunan.

Mulyadi, Johny Setiawan. 2001 **Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen**, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**, CV. Alfabeta, Bandung.

P. Joko Subagyo. 2004. **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kota Palembang No.13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Yogi, MS. 2007. **Manajemen Stratejik Terapan**, CV. Poliyama Widya Pustaka, Jakarta.

Yuli Deniati. 2006. Analisis Pengendalian Biaya Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang. Palembang.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS TATA KOTA

Jalan Slamet Riady Nomor 14 Telepon (0711) 713877 Fax. (0711) 718789 Palembang

Palembang, 11 Februari 2008

Nomor : 000 / 346 / DTK / 2008
Tingkat : Segera
Mempunyai : -
Perihal : Keterangan Selesai Riset.

h. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Jend. A. Yani 13 Ulu
Palembang

Sehubungan dengan surat Nomor : 710/3483/DTK/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Surat Pengantar Selesai Riset, dengan ini diterangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang di bawah ini :

Nama : Muhammad Dadi
Nim : 22 2003 086
Jurusan : Ekonomi Akuntansi

telah menyelesaikan risetnya (dari tanggal 17 Nopember sampai dengan 23 Nopember 2007) pada Kantor Dinas Tata Kota Kota Palembang dengan memperoleh data tentang Sistem Pengendalian Manajemen Dinas Tata Kota Kota Palembang.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS TATA KOTA
KABAG. TATA USAHA
Dr. AMRAH MUSLIMIN
NIP. 440 015 327



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AMA MAHASISWA : MUHAMMAD DADI PEMBIMBING
 IM : 22 2003 086 KETUA : M. ORBA KURNIAWAN, SE. SH
 JURUSAN : AKUNTANSI ANGGOTA

JUDUL USULAN PENELITIAN : STRATEGI MANAJEMEN DINAS TATA KOTA DALAM
 UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN
 MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS TATA KOTA KOTA
 PALEMBANG

TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
24/11 - 07	prn up			paruban
26/11 - 07	prn up			Ace
30/11 - 07	Up			prn
3/12 - 07	Up			prn
8/12 - 07	up			prn
10/12 - 07	up			prn
22/12 - 07	Up			Ace dan Semr

tanggal Seminar yang disepakati : 5/1/07
 Jam : 16.00

Di keluarkan : Palembang
 Pada Tgl
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan,

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
 Yang dibawa oleh Pemakalah

Nama Mahasiswa	N I M	Tanda Tangan

Drs. Sunardi, SE. M.Si

ATAN :
 Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
 Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD DADI PEMBIMBING
 NIM : 22 2003 086 KETUA M. ORBA KURNIAWAN, SE. SH
 JURUSAN : AKUNTANSI ANGGOTA

**TITEL USULAN PENELITIAN : STRATEGI MANAJEMEN DINAS TATA KOTA DALAM
 UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN
 MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS TATA KOTA KOTA
 PALEMBANG**

TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
24/11 - 07	pra up	<i>[Signature]</i>		parubani
26/11 - 07	pra up	<i>[Signature]</i>		Ace
30/11 - 07	Up	<i>[Signature]</i>		prubani
3/12 - 07	Up	<i>[Signature]</i>		prubani
8/12 - 07	Up	<i>[Signature]</i>		prubani
10/12 - 07	Up	<i>[Signature]</i>		prubani
22/12 - 07	Up	<i>[Signature]</i>		Ace dan Sem

Tanggal Seminar yang disepakati : 5/12/07
 Jam : 16.00

Di keluarkan : Palembang
Pada Tgl

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah



[Signature]
Drs. Suwardi, SE. M.Si

Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan

TATAN :
 Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
 Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD DADI

PEMBIMBING

N I M/NIRM : 22 2003 036

KETUA : M. ORBA KURNIAWAN, SE. SH

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN/AKUNTANSI

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : STRATEGI MANAJEMEN DINAS TATA KOTA DALAM RA NGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS TATA KOTA KOTA PALEMBANG

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	14/01 08	Bab I & II & III	<i>[Signature]</i>		perbaiki
2	16/01 08	Bab I, II & III	<i>[Signature]</i>		Ace + perbaikan
3	19/01 08	Bab II + III	<i>[Signature]</i>		perbaikan & Ace
4	29/01 08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaikan
5	4/02 08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaikan
6	8/02 08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaikan
7	12/2 08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaikan
8	16/2 08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		Ace
9	16/2 08	Bab V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
10	18/2 08	Bab V	<i>[Signature]</i>		Ace
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

n. Dekan
Dina Jurusan,
[Signature]
SUNARDI, SE. M.si





Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 043/J-10/FE-UMPA/X/11/2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

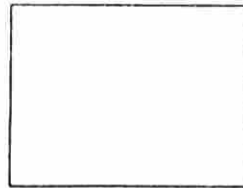
Diberikan Kepada :

Nama : MUHAMMAD DA'DI

NIM : 22 2003 086

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 06 Desember 2007.1
26 Desember 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan IV,



M. Bayaruddin, S.E., Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Dadi

Tempat/Tanggal Lahir: Palembang/30 Juli 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. May Zen Kavling III No. 87 RT. 12 RW. 04
Sei-Selayur, Kalidoni Palembang

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua

1. Ayah : Ir. Syakroni

2. Ibu : Khodijah

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pegawai Swasta

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua

1. Ayah : Jl. May Zen Kavling III No. 87 RT. 12 RW. 04
Sei-Selayur, Kalidoni Palembang

2. Ibu : Jl. May Zen Kavling III No. 87 RT. 12 RW. 04
Sei-Selayur, Kalidoni Palembang